

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Sukoharjo

Halaman 14 dan 15

Akhir Juni Tak Diambil, Dana Desa Hangus

SUKOHARJO - Batas waktu percekunan dana desa tahap II sampai akhir bulan Juni, bila tidak dicekunan maka dinyatakan hangus dan dana desa kembali ke kas negara. Informasi tersebut ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Boediarso Teguh Widodo, pada acara Diseminasi Dana Desa di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) Setda Pemkab Sukoharjo, Kamis (3/5).

“Untuk yang tahap pertama sudah dicekunan, namun untuk tahap kedua belum. Kita harapkan sampai sebelum akhir Juni semua sudah bisa dicekunan, kalau tidak, nanti (Dana Desa) bisa hangus,” kata Boediarso Teguh Widodo.

Sukoharjo menjadi daerah ke 34 dari 71 daerah yang masuk dalam program percekunan Diseminasi Dana Desa yang dimotori oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Desa (Kemendes). Diikuti oleh seluruh kepala desa dan camat se Kabupaten Sukoharjo.

Dijelaskan Boediarso skema perubahan Dana Desa yang tahun ini dibagi dalam tiga tahap yakni 1, 2 dan 3, agar bisa terserap dengan optimal untuk pembangunan desa. Selain itu penggunaan dana desa dalam untuk kegiatan padat karya diharapkan juga mampu menaikkan perekonomian masyarakat dan pengusaha lokal.

“Diharapkan tenaga kerja akan terserap, warga mendapat penghasilan. Daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa juga akan meningkat. Karena prinsip yang digunakan adalah swakelola, pekerja dari masyarakat setempat, bahan baku dari wilayah setempat,” tandasnya.

Sementara Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, melaporkan kucuran dana desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan. Dimulai dari tahun 2015 sebesar Rp 43 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 96 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 123 miliar dan tahun 2018 naik menjadi Rp 126 miliar.

“Keterlambatan pencairan Dana Desa tahap kedua akan segera diatasi melalui keterlibatan pemerintah daerah. Nanti akan dikumpulkan lagi agar kendala yang dihadapi dari para Kepala Desa akan dapat diselesaikan,” tandas Bupati. (dea/saf)